



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK

Jalan Raya Pucuk No. 92, Lamongan, Jawa Timur 62257,
Telepon (0322) 390614, Pos-el pucuk@lamongankab.go.id
Laman www.pucuk.lamongankab.go.id

Pucuk, 09 Maret 2026

Nomor : 700.1.2.1/8.9/413.313/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Tindak lanjut Laporan Hasil Reviu
Manajemen Resiko Kecamatan Pucuk
Kabupaten Lamongan Tahun 2025

Kepada
Yth. Inspektur Kabupaten Lamongan
Di Lamongan

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Inspektorat Kabupaten Lamongan nomor 700.1.2.1/8.9/LHP/413.060/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Laporan Hasil Evaluasi Manajemen Resiko Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

Camat Pucuk

NURUL MISBAH, S.H., M.M.
Pembina Tk. I

NIP. 19700501 199302 1 005

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI MANAJEMEN RESIKO

KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2025

No	Periode LHEAK / Nomor	Rekomendasi	Penanggung Jawab	Rencana Tindak Lanjut	Progress Penyelesaian
1	Nomor: 700.1.2.1/8.9/LHP/413.060/2026 Tanggal: 15 Januari 2026	Mengidentifikasi dan menetapkan jenis Risiko <i>Fraud</i> dan Risiko Kemitraan dalam Mitigasi Risiko Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan pada setiap kegiatan	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Risiko Fraud dan Risiko Kemitraan telah dianalisis tingkat dampak dan kemungkinannya serta dicantumkan dalam tabel	Sudah dilaksanakan sesuai rekomendasi

Pucuk, 09 Maret 2026

Camat Pucuk



NURUL MISBAH, S.H., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19700501 199302 1 005

No	Nama Unit Kerja	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			
									Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	Kecamatan Pucuk		Nilai Sinergitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Nilai Manajemen Resiko	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	Tahap Perencanaan	Operasional : Keterlambatan menyusun RKA		ROO.26.99.54.01	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
									Kemitraan: Tidak terakomodirnya usulan perencanaan anggaran		ROO.26.99.54.02	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
									Fraud: Penambahan Jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanpa alasan yang jelas	Pejabat Pembuat Komitmen memberikan penambahan waktu tidak sesuai SPK	ROO.26.99.54.03	PPTK
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Tahap Pelaksanaan	Operasional : Keterlambatan penyusunan laporan keuangan		ROO.26.99.54.04	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
									Kemitraan: Keterlambatan verifikasi laporan keuangan oleh BPKAD		ROO.26.99.54.05	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
									Fraud: Pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai dengan realisasi kegiatan	PPTK menyampaikan SPJ kegiatan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan pelaksanaan riil kegiatan.	ROO.26.99.54.06	Bendahara Pengeluaran
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Terpelihara Dengan Baik	Tahap Pelaksanaan	Operasional : Sarana dan prasarana kantor tidak terpelihara secara optimal		ROO.26.99.54.07	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									Kemitraan: Keterlambatan atau kualitas pekerjaan pemeliharaan oleh penyedia jasa		ROO.26.99.54.08	PPTK
									Fraud: Penggunaan sarana dan prasarana kantor untuk kepentingan pribadi	Pegawai menggunakan fasilitas kantor di luar kepentingan dinas.	ROO.26.99.54.09	Pengurus Barang
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor Dalam Kondisi Baik	Tahap Pelaksanaan	Operasional : Proses pengadaan barang tidak selesai sesuai jadwal yang direncanakan.		ROO.26.99.54.10	PPK/PPTK
									Kemitraan : Koordinasi dengan penyedia selama pelaksanaan pengadaan belum berjalan optimal.		ROO.26.99.54.11	PPTK
									Fraud : Perubahan Spesifikasi untuk kepentingan pribadi	PPK merubah spesifikasi barang yang kualitasnya tidak sesuai karena ingin memperoleh margin keuntungan	ROO.26.99.54.12	PPTK
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedia Dengan Baik	Tahap Pelaksanaan	Operasional : Jasa penunjang tidak tersedia secara optimal.		ROO.26.99.54.13	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									Kemitraan : Kinerja penyedia jasa penunjang tidak sesuai kesepakatan.		ROO.26.99.54.14	PPTK

No	Nama Unit Kerja	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			
									Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik
											Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
									Fraud : Pembayaran jasa penunjang tidak sesuai dengan realisasi layanan.	Pembayaran dilakukan penuh meskipun sebagian jasa penunjang tidak terlaksana sesuai kesepakatan.	ROO.26.99.54.15	PPTK
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara Denoan Baik	Tahap Pelaksanaan	Operasional : Pemeliharaan barang milik daerah tidak dilakukan secara rutin.		ROO.26.99.54.16	Kasubag Umum dan Kepegawalan
									Kemitraan : Pelaksanaan pemeliharaan oleh penyedia tidak sesuai standar.		ROO.26.99.54.17	PPTK
									Fraud : Pembayaran pemeliharaan tidak sesuai realisasi pekerjaan.	Pembayaran dilakukan meskipun hasil pemeliharaan tidak sepenuhnya terlaksana.	ROO.26.99.54.18	PPTK
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Tepat Waktu		Operasional : Pengaturan alur pelayanan administrasi kependudukan berpotensi belum optimal pada periode tertentu.		ROO.26.99.54.19	Kasi Pelayanan Publik
									Kemitraan : Ketersediaan blanko KTP berpotensi tidak mencukupi pada periode tertentu.		ROO.26.99.54.20	Kasi Pelayanan Publik
									Fraud : Pencatatan jumlah pelayanan administrasi kependudukan berpotensi belum dilakukan secara optimal.	Petugas pelayanan berpotensi belum melakukan pencatatan dan rekapitulasi jumlah pelayanan administrasi kependudukan secara berkala.	ROO.26.99.54.21	Kasi Pelayanan Publik
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tahap Pelaksanaan	Operasional : Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa tidak berjalan optimal.		ROO.26.99.54.22	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
									Kemitraan : Partisipasi pemerintah desa dan mitra pendukung belum optimal.		ROO.26.99.54.23	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
									Fraud : Pemangkas anggaran kegiatan pemberdayaan	PPTK melakukan Pemangkas anggaran kegiatan pemberdayaan untuk kepentingan pribadi	ROO.26.99.54.24	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
						Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Tahap Pelaksanaan	Operasional : Partisipasi keluarga dalam kegiatan peningkatan ketahanan pangan belum optimal.		ROO.26.99.54.25	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
									Kemitraan : Koordinasi dengan PKK kelurahan/desa belum optimal.		ROO.26.99.54.26	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
									Fraud : Data peserta kegiatan tidak sesuai kondisi riil.	Data jumlah keluarga peserta dilaporkan lebih besar dari jumlah kehadiran sebenarnya.	ROO.26.99.54.27	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa Yang Dikoordinasi Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tahap Pelaksanaan	Operasional : Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum belum menjangkau seluruh desa secara optimal.		ROO.26.99.54.28	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
									Kemitraan : Koordinasi dengan pemerintah desa dan unsur terkait belum berjalan optimal.		ROO.26.99.54.29	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
									Fraud : Pelaporan kegiatan koordinasi tidak sesuai dengan kondisi pelaksanaan di lapangan.	Jumlah desa yang dilaporkan telah dikoordinasi tidak sepenuhnya sesuai dengan kegiatan koordinasi yang dilaksanakan.	ROO.26.99.54.30	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Nama Unit Kerja	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			
									Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik
a	b	c	d	e	f	g	h	i		j	k	
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum	Tahap Pelaksanaan	Operasional : Pelaksanaan koordinasi urusan pemerintahan umum belum berjalan sesuai jadwal penugasan.		ROO.26.99.54.31	Kasi Pemerintahan
									Kemitraan : Koordinasi dengan instansi terkait berpotensi belum optimal.		ROO.26.99.54.32	Kasi Pemerintahan
									Fraud : Pelaporan kegiatan koordinasi berpotensi kurang didukung dokumentasi lengkap.	Pelaksana kegiatan berpotensi menyusun laporan tanpa kelengkapan dokumentasi pendukung yang memadai.	ROO.26.99.54.33	Kasi Pemerintahan
						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tahap Pelaksanaan	Operasional : Pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa berpotensi belum terlaksana optimal sesuai rencana.		ROO.26.99.54.34	Kasi Pemerintahan
									Kemitraan : Koordinasi dengan pemerintah desa berpotensi belum berjalan optimal.		ROO.26.99.54.35	Kasi Pemerintahan
									Fraud : Pengelembungan biaya kegiatan pembinaan	PPTK menerima gratifikasi agar fasilitasi pembinaan berjalan lancar	ROO.26.99.54.36	PPTK



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK

Jalan Raya Pucuk No. 92, Lamongan, Jawa Timur 62257,
Telepon (0322) 390614, Pos-el pucuk@lamongankab.go.id
Laman www.pucuk.lamongankab.go.id

Pucuk, 09 Maret 2026

Nomor : 700.1.2.1/~~199~~413.313/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Tindak lanjut Laporan Hasil Reviu
Manajemen Resiko Kecamatan Pucuk
Kabupaten Lamongan Tahun 2025

Kepada
Yth. Inspektur Kabupaten Lamongan
Di Lamongan

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Inspektorat Kabupaten Lamongan nomor 700.1.2.1/8.9/LHP/413.060/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Laporan Hasil Evaluasi Manajemen Resiko Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

Camat Pucuk

9/3/26

NURUL MISBAH, S.H., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19700501 199302 1 005